



Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Krisma Eka Putra

Masyarakat Butuh Penyelesaian, Jangan Ada Darurat Sampah

Masalah sampah di Kota Yogyakarta seolah-olah tiada habisnya. Padahal beragam solusi dan program telah dijalankan pemerintah. "Namun pertanyaannya apakah program-program itu berjalan tanpa halangan," ucap Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Krisma Eka Putra dengan nada tanya kemarin (25/4).

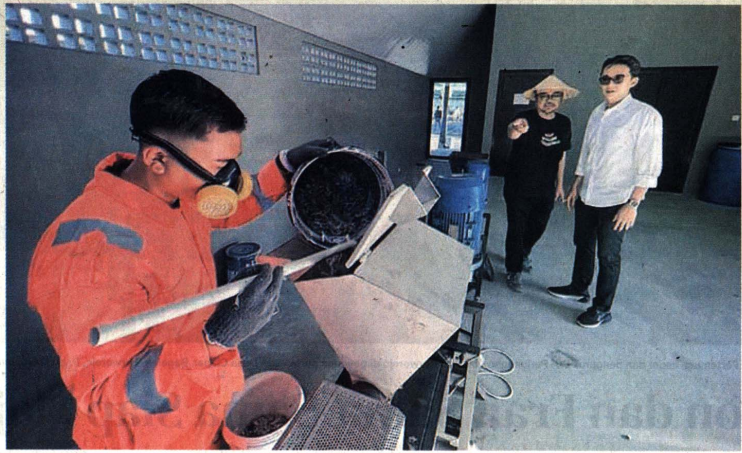


KRISMA juga duduk sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta. Beberapa waktu terakhir, wakil rakyat yang tinggal di Ndalem Kaneman, Kraton, Yogyakarta itu bicara kritis. Menurut dia, misi Pemda DIY jelas soal penancangan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten dan kota. "Sudah seharusnya itu ditindaklanjuti serius dengan sinergitas kabupaten dan kota dalam menyelesaikan persoalan yang ada," pintanya.

Namun demikian, Krisma melihat belakangan menerima informasi ego sektoral terkait dengan pengelolaan sampah ini sangat tinggi. Dia merasa tertegun ketika itu dilakukan oleh oknum pejabat Pemda DIY yang sedang diberikan tugas atau di bawah kendali operasi (BKO)-kan di wilayah daerah tingkat dua. "Semoga yang bersangkutan segera sadar bahwa persoalan sampah ini adalah persoalan yang harus cepat ditanggulangi," desaknya.

Diingatkan, pejabat Pemda DIY seharusnya mendukung penuh kebijakan Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Bukan malah menekan aparat di bawahnya untuk menggagalkan program gubernur. "Menurut saya itu sudah tidak etis dan perlu ada evaluasi khusus di tataran pimpinan," desaknya.

Kerja sama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota maupun dengan swasta dalam menuntaskan persoalan sampah sangat diperlukan. Krisma



MENGOLAH SAMPAH: Krisma Eka Putra menyaksikan pengolahan sampah menjadi batu bata dan keramik. Dia mengingatkan butuh keseriusan dan sinergitas mengelola sampah.

Diingatkan, Kota Yogyakarta bakal menghadapi lonjakan sampah dengan ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, dengan dikembalikan pengelolaan sampah ke kabupaten dan kota. Saat ini, lanjut Krisma, bukan waktunya membuat "dagelan". Masyarakat membutuhkan penyelesaian, "Saya sudah terlanjur janji kepada masyarakat tidak akan ada darurat sampah di Kota Yogyakarta. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menuntaskan persoalan ini," tegasnya. (**oso/kus/zl**)

mewanti-wanti agar aparat sipil negara (ASN) tidak bermain politik. "Sekali lagi itu tidak etis,"

ingat alumni Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini.

Saya sudah terlanjur janji kepada masyarakat tidak akan ada darurat sampah di Kota Yogyakarta. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menuntaskan persoalan ini."

KRISMA EKA PUTRA
 Sekretaris Komisi B DPRD
 Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005